



PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Kabupaten Purworejo
Tahun Penilaian	: 2022
Periode yang dinilai	: 2022
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026
Tujuan Strategis RPJMD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda	
Nama Dinas Terkait	Kecamatan Bayan
Sasaran RPJMD	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan
IKU Sasaran RPJMD	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan
Prioritas pembangunan dan program unggulan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan
	<p style="text-align: right;">Bayan, 3 Januari 2022 CAMAT BAYAN</p>  <p style="text-align: right;">MOEHARDJONO, SE NIP. 10640710 198803 1 014</p>

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Kabupaten Purworejo	
Tahun Penilaian	: 2022	
Periode yang dinilai	: 2022	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Bayan	
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo	
Tujuan Strategis	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan	
IKU Renstra OPD	IKU	2022
	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan	
Informasi lain		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan	
		 <p>Bayan, 3 Januari 2022 CAMAT BAYAN MOEHARDJONO, SE NIP. 196407101988031014</p>

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	meningkatkan kualitas layanan masyarakat	persentase jenis layanan di kecamatan yang berkualitas	Rendahnya indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik kecamatan		camat	Sarana dan Prasarana PATEN belum memadai (belum ada layanan online) Pejabat penandatanganan tidak ada petugas pelayanan kosong/ petugas terbatas		c	penyelesaian administrasi warga tidak sesuai timeline masyarakat menunggu lama	masyarakat
						informasi terkait berkas administrasi tidak jelas 1. Penyusunan SPJ belum selesai 2. regulasi dari kabupaten berubah		c	masyarakat menunggu lama masyarakat bolak balik melengkapi berkas	masyarakat
2			keterlambatan pencairan dana desa pada banyak kantor desa		camat			c	tidak bisa menjalankan rencana kegiatan berikutnya	permdes dan masyarakat
3			aduan masyarakat tidak ditindaklanjuti segera		camat	petugas aduan terlambat dalam membuka aduan		c	tidak bisa menjalankan rencana kegiatan berikutnya	masyarakat

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/ Renstra
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e diisi dengan Kode risiko
- Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine, dan Material*
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/ internal)
- Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
- Kolom k diisi dengan pihak/ unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

<p>Program Koordinasi Ketertarikan dan Keterlibatan Umum Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum</p>	<p>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Kecamatan</p>	<p>Terjalannya sinergitas Polri, Koramil, UPT/Dinas Kecamatan dalam mewujudkan Kamtibmas yang kondusif</p>	<p>terjad banjr di wilayah kecamatan Bayan</p>	<p>gangguan kamtibmas</p>	<p>Geografis wilayah yg rawan bencana 1. Penduduk yg heterogen serta jumlahnya yg banyak dan geografis yang luas 2. Terbatasnya jumlah personel di Internal Polsek, TNI, UPT/Dinas atau Kecamatan</p>	<p>aktfitas masyaakat terganggu, timbul penyakit menular</p>	<p>aktfitas terganggu</p>
<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa</p>	<p>Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan</p>	<p>Terwujudnya efektifitas pemberdayaan masyarakat</p>	<p>Rendahnya animo Pemerintah Desa pada kegiatan pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>Kasi Pemberdayaan n masyarakat</p>	<p>Hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat memerlukan waktu yg lama dibanding kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</p>	<p>ketramplilan masyarakat rendah</p>	
<p>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan :</p>	<p>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p>	<p>terwujudnya efektifitas kegiatan di tingkat kecamatan</p>	<p>kuualitas musrenbang tidak sesuai dengan harapan</p>	<p>ekobang</p>	<p>Bundes belum dapat berperan maksimal dim pemberdayaan Masy. UMKM, Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, LPMD, RW/RT/Karang Taruna) belum dpt berperan maksimal dim pemberdayaan masy. Rendahnya partisipasi masyarakat dim kegiatan pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>hasil musrenbang tidak mewakili aspirasi sebagian besar masyarakat pendapat masyarakat tidak sampai ke kabupaten</p>	
<p>Kegiatan :</p>	<p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilabakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yg ada di Kecamatan</p>	<p>Terwujudnya pelayanan PATEN yang efektif dan memuaskan</p>	<p>keterlambatan pencapaian dana transfer desa</p>	<p>ekbang</p>	<p>desa terlambat melakukan pencapaian</p>	<p>kinerja kecamatan rendah</p>	
<p>Kegiatan :</p>	<p>Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan</p>	<p>memuaskan</p>	<p>Pelayanan PATEN belum memuaskan masyarakat</p>	<p>Kasi Pembanguan n</p>	<p>Penyelesaian dokumen pelayanan yang lama/tidak sesuai ketepatan waktu</p>	<p>penyelesaian administrasi warga tidak sesuai timeline</p>	
					<p>Sarana dan Prasarana PATEN belum memadai</p>	<p>masyarakat menunggu lama</p>	
					<p>Petugas Pelayanan belum memberikan pelayanan yg maksimal</p>	<p>masyarakat menunggu lama</p>	
					<p>Persyaratan pelayanan yg diajukan tidak lengkap</p>	<p>masyarakat bolak balik melingkapi berkas</p>	

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap	Risiko		Pemilik	Sebab*)		C/UC	Dampak**)		
				Uraian	Uraian		Uraian	Uraian				
Nama Pemda : Kabupaten Purworejo Nama OPD : Kecamatan Bayan Tahun Penilaian : 2022 Periode yang dinilai : Tujuan Strategis : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sasaran strategis OPD : meningkatkan kualitas layanan masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Kewilayahan OPD yang Dinilai : Kecamatan Bayan												
a	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		d									
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terwujudnya terbit administrasi Pemerintahan Desa	1	Tata Naskah Dinas tidak sesuai ketentuan	Kasi Pemerintahan Desa		Perangkat Desa belum memahami ketentuan Tata Naskah Dinas		C	naskah dinas tidak dapat dipahami dan naskah dinas satu dengan yang lain tidak seragam		
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya tupoksi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan	1	Arsip belum dikelola dengan baik			Kurang pemahaman Perangkat Desa tentang pentingnya Arsip		C	Dokumen dokumen penting banyak yang hilang		
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Terlaksananya tugas dan Fungsi BPD sesuai ketentuan dalam perda dan Perbup	1	Pelaksanaan tupoksi tidak sesuai ketentuan Perda/Perbup	Kasi Pemerintahan Desa		Belum dipahaminya perda/perbup yg mengatur tupoksi Kepala Desa dan Perangkat Desa		C	ada tugas yang tidak dikerjakan		
				Pekerjaan hanya dibebankan pada Perangkat Desa tertentu			Kepala Desa belum membagi tugas Perangkat Desa sesuai Tupoksi		C	beban kerja tidakimbang.		
				Terlambatnya pelaksanaan tugas Kepala Desa/Perangkat Desa			Banyaknya ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diterbitkan secara mendadak/tiba-tiba		C	kegiatan enyeelenggaraan mntah dsa menjadi terfambat		
				Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD tidak sesuai ketentuan Perdes/Perbup	Kasi Pemerintahan Desa		Belum dipahaminya perda/perbup yg mengatur tugas dan fungsi BPD oleh Anggota BPD		C	pelaksanaan tugas dan fungsi BPD tidak maksimal		
				BPD melaksanakan tugas melampaui kewenangan BPD			Belum dipahaminya perda/perbup yg mengatur tugas dan fungsi BPD oleh Anggota BPD		C	hubungan antara pemerintah desa dan BPD tidak harmonis sehingga penyelenggaraan pemerintah desa tidak berjalan dengan baik		
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Perdes)	Diterbitkannya Rekomendasi Camat tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Perdes)	1	Rekomendasi Camat tidak diterbitkan atau ditunda karena Pelaksanaan Pengangkatan/ Pemberhentian Perdes tidak sesuai Perda/Perbup	Kasi Pemerintahan Desa		Panitia tidak netral dalam Pelaksanaan Pengangkatan Perdes		C	perangkat desa terpilih tidak dapat dilantik		
							Tidak ada yg mendaftar sebagai Bakal Calon Perangkat Desa		C	terdapat kekosongan jabatan di pemerintah desa		
							Panitia Pelaksana kurang memahami mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perdes		C	pelaksanaan seleksi pengangkatan pemerintah desa tidak maksimal		
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum											
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkompimcam)	Terlaksananya Penugasan dari Kepala Daerah oleh Forkompimcam	1	Pelaksanaan Penugasan dari Kepala Daerah tidak berjalan lancar	Kasi Trantib		Kurangnya koordinasi dari Forkompimcam			banyak kegiatan yang tidak efisien dan efektif		
							Kesibukan internal Instansi Anggota Forkompimcam			kegiatan tidak berjalan maksimal		

Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Kabupaten Purworejo				
Tahun Penilaian	: 2022				
Tujuan Strategis Pemda	: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
Tujuan Strategis OPD	: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
Tujuan Operasional OPD	: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, koordinasi tramtibum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
Urusan Pemerintahan	: Urusan Kewilayahan				
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis					
II Risiko Strategis OPD 1:					
	Rendahnya indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik kecamatan		4	4	16
	keterlambatan pencairan dana desa pada banyak kantor desa		4	3	12
	aduan masyarakat tidak ditindaklanjuti		4	2	8
III Risiko Operasional OPD 1:					
	Tata Naskah Dinas tidak sesuai ketentuan		4	4	16
	Arsip belum dikelola dengan baik		4	4	16
	Pelaksanaan tupoksi tidak sesuai ketentuan Perda/Perbup		4	2	8
	Pekerjaan hanya dibebankan pada Perangkat Desa tertentu		3	3	9
	Terlambatnya pelaksanaan tugas Kepala Desa/Perangkat Desa		4	3	12
	Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD tidak sesuai ketentuan Perda/Perbup		3	3	9
	BPD melaksanakan tugas melampaui kewenangan BPD		4	3	12
	Rekomendasi Camat tidak diterbitkan atau ditunda karena Pelaksanaan Pengangkatan/ Pemberhentian Perdes tidak sesuai Perda/Perbup		4	2	8
	Pelaksanaan Penugasan dari Kepala Daerah tidak berjalan lancar		4	3	12
	terjadi banjir di wilayah kecamatan Bayan		3	3	9
	gangguan kamtibmas		4	4	16
	Rendahnya animo Pemerintah Desa pada kegiatan pemberdayaan Masyarakat		2	4	8
	kualitas musrenbang tidak sesuai dengan harapan		2	3	6
	keterlambatan pencairan dana transfer desa		3	4	12
	Pelayanan PATEN belum memuaskan masyarakat		4	4	16

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

MATRIKS ANALISIS RISIKO

MATRIKS ANALISIS RISIKO		Dampak/Konsekuensi				
		Tidak signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat signifikan
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	5	2	3	4	5
	Kemungkinan besar	4	1		5	
	Kemungkinan kecil	3	1	3	5	
	Sangat jarang	2			3	
	Sangat jarang	1				
Keterangan :		Risiko dapat diterima				
		Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Selanjutnya				
		Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Prioritas				

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo Tahun Penilaian : 2022 Tujuan Strategis : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Pemerintahan : Urusan Kewilayahan								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	
a	I Risiko Strategis	b	c	e	f	g	h	
	terhambatnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan		Menetapkan SOP, Petugas PATEN serta pendelegasian kewenangan penanda tanganan dokumen		Sosialisasi, pemasangan dan penyebarluasan pengumuman tentang persyaratan dalam PATEN	camat		
	II Risiko Operasional							
	Tata Naskah Dinas tidak sesuai ketentuan				Pembinaan pengelolaan Administrasi Desa melalui kegiatan Sosialisasi, monitoring ke Desa	kasi pemerintahan desa		
	Atsrip belum dikelola dengan baik				Pembinaan dan monitoring pengelolaan kearsipan	kasi pemerintahan desa		
	Gangguan Kamtibmas				Melibatkan Desa dalam menjalankan pemantauan keamanan wilayah	kasi pemerintahan desa		
	Pelayanan PATEN belum memuaskan masyarakat				Peningkatan Sapras pelayanan	Kasi Pembangunan		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP